

DORONG TRANSPORTASI UMUM

Ganjil Genap Bakal Kembali Berlaku di 13 Ruas Jalan

JAKARTA (IM) - Penerapan ganjil genap di 13 ruas jalan Jakarta diharapkan dapat membuat masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum. Kabid Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Massdes Arouffy mengatakan kebijakan ganjil genap ini sejalan dengan kembali diperbolehkannya angkutan umum mengangkut penumpang hingga 100 persen kapasitas.

"Pengguna kendaraan pribadi masih kami batasi dengan ganjil genap agar switch ke kendaraan umum. Ini akan perlu waktu," ujar Massdes Arouffy dalam webinar MTI pada Kamis (4/11).

Massdes menjelaskan, saat ini jumlah pengguna angkutan umum masih di angka 40 persen atau masih di bawah 1 juta orang. Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, jumlah pengguna kendaraan umum mencapai 2 juta orang lebih.

Jumlah pengguna kendaraan umum diperkirakan akan terus meningkat saat Pemprov DKI Jakarta menambah ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap. Sebelum pandemi Covid-19, ganjil genap Jakarta diberlakukan di 23 ruas jalan. Saat ini rencana kebijakan tersebut masih digodok.

Massdes menjelaskan tren peningkatan masyarakat yang menggunakan transportasi umum sudah mulai terlihat.

Sejak PPKM Level 1 sudah ditetapkan dua hari lalu, Massdes mengatakan sudah ada peningkatan 6,09 persen masyarakat yang menggunakan transportasi umum.

"Dua minggu ke depan baru akan terlihat impact-nya. Tren ini akan terus tumbuh," kata Massdes.

Sebelumnya, pemberlakuan ganjil-genap di 13 ruas jalan sudah berlaku sejak Senin (18/10).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisar Besar Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, ganjil-genap berlaku tiap Senin sampai Jumat pada pagi hari pukul 06.00-10.00 dan sore hari pukul 16.00-20.00 WIB. Kebijakan ini ditetapkan saat hari libur.

Aturan ganjil genap berlaku di 13 ruas jalan, yaitu:

1. Jalan Sudirman
2. Jalan MH Thamrin
3. Jalan Rasuna Said
4. Jalan Fatmawati
5. Jalan Panglima Polim
6. Jalan Sisingamaraja
7. Jalan MT Haryono
8. Jalan Gatot Subroto
9. Jalan S Parman
10. Jalan Tomang Raya
11. Jalan Gunung Sahari
12. Jalan DI Panjaitan
13. Jalan Ahmad Yani

Sebelumnya, ganjil genap Jakarta hanya berlaku di tiga ruas jalan, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Thamrin dan Jalan Rasuna Said atau Kuningan. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



WASPADA FENOMENA LA NINA

Awan hitam menyelimuti langit Jakarta, Kamis (4/11). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi curah hujan yang tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologis di sejumlah daerah akibat adanya fenomena La Nina yang di prediksi akan berlangsung dari akhir tahun hingga Februari 2022.

2022, Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Revitalisasi 3 Pelabuhan di Kepulauan Seribu

Dengan dihidupkannya kembali tiga pelabuhan tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Seribu. Ketiga pelabuhan tersebut ada di Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Sebira. Kegiatan revitalisasi Pelabuhan ini sempat dihentikan karena refocusing anggaran imbas pandemi Covid-19.

JAKARTA (IM) - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengkaji ulang kegiatan revitalisasi tiga pelabuhan di Kepulauan Seribu. Saat ini tiga pelabuhan itu disebut vital untuk menunjang aktivitas dan perekonomian warga.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa merinci, ketiga pelabuhan tersebut yakni ada di Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Sebira. Kegiatan revitalisasi sempat dihentikan karena refocusing anggaran imbas pandemi Covid-19.

Untuk itu, Komisi B mendorong agar kegiatan tersebut dihidupkan kembali dan menjadi prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon

Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.

"Kita berharap dalam tahun anggaran ini tahun 2022 dihidupkan kembali, karena kita memang concern sekali dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu," kata Steven kepada wartawan, Kamis (4/11).

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dishub DKI, revitalisasi tiga pelabuhan menjadi salah satu target yang akan dicapai tahun 2022 berdasarkan dokumen rancangan akhir (Ranhir) Perubahan RPJMD tahun 2017-2022.

Di mana, Dishub DKI sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp160 miliar untuk merevitalisasi tiga pelabuhan tersebut melalui skema

APBD DKI di tahun 2020 dan 2021.

"Dengan dihidupkannya kembali tiga pelabuhan tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Seribu," kata Steven.

Seperti halnya, di Pulau Sabira yang notabene masih belum memiliki pelabuhan namun banyak kapal-kapal besar yang melintas.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI, Nur Afni Sajim. Menurutnya, revitalisasi tiga pelabuhan di Kepulauan Seribu setidaknya akan mempermudah kegiatan perekonomian warga sekitar.

"Maka dari itu kami dari Komisi B minta segala sesuatunya diusulung kegiatan yang terfokus, baik kegiatan peningkatan ekonomi ataupun pelayanan masyarakat untuk diusulung kembali," terang Nur Afni.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan pihaknya telah kembali mengakomodir anggaran revitalisasi tiga pelabuhan Kepulauan Seribu dan akan segera dieksekusi sesuai kebutuhan di 2022. Baca juga: Pulau Panjang Kepulauan Seribu Disiapkan Jadi Tempat Wisata Religi

"Karena itu sudah kita pertimbangkan untuk menghidupkan kembali anggaran

revitalisasi tiga pelabuhan di tahun depan (2022)," tutup Syafrin. ● yan

Sempat tak Kebagian Kuota Uji Emisi, Pengendara Marah-marah

JAKARTA (IM) - Sejumlah pengendara protes karena sempat tidak mendapatkan kuota uji emisi kendaraan di Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, karena peminat membeludak pada Kamis (4/11).

Salah satu pengendara, Dandi, marah-marah karena sempat tidak mendapatkan antrian. Ia datang pukul 10.00 WIB dari Bekasi. "Saya sudah jauh-jauh, sudah macet-macet, habis," kata Dandi dalam video yang diterima, Kamis. "Saya dari Bekasi, dari Monas muter. Maunya saya pemerintah juga harus ngerti juga dong kalau mau nerapin peraturan. Kita udah capek-capek kayak gini," ujar Dandi. Pengendara lainnya, Ari juga mengatakan bahwa sempat ada protes dari sejumlah pengendara. Ia datang pukul 09.00 WIB dari Makasar, Jakarta Timur.

Ari sempat memutuskan pulang Namun, ia kembali mengantre setelah salah satu petugas keamanan memperbolehkan kendaraan-kendaraan masuk. "Banyak orang-orang pada protes kenapa habis. Sementara di lamannya itu ditulis dari pukul 08.00 sampai 14.00 WIB itu ditulis tidak ada kuota," ujar Ari di lokasi. Namun, pihak Dinas Lingkungan Hidup kemudian memperbolehkan kendaraan-kendaraan masuk.

Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan DLH DKI, Tiyana Broto Adi mengatakan, meski kuota penuh, pihaknya akan tetap membuka pelayanan hingga pukul 14.00 WIB. "Kita nanti sampai pukul 14.00 WIB kita tutup," kata Tiyana.

Pemprov DKI Jakarta awalnya mengumumkan akan menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi mulai 13 November 2021. Kala itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, sebelum sanksi tilang diberlakukan, Pemprov DKI Jakarta menyosialisasikan kebijakan ini sampai 12 November 2021. Penerapan

sanksi tilang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 undang-undang tersebut, sanksi denda untuk sepeda motor maksimal Rp 250.000, sedangkan mobil didenda maksimal Rp 500.000.

Sepekan setelah diumumkan penerapan sanksi tilang, Polda Metro Jaya menyebut kendaraan yang belum melakukan atau tidak lulus uji emisi tidak langsung ditilang saat pemberlakuan sanksi mulai 13 November 2021. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono mengatakan, pihaknya baru akan memberikan sanksi teguran mulai 13 November 2021, sebagai bentuk sosialisasi kebijakan. "Jadi gini, sebetulnya sanksi ini kan ada berbagai macam, ada tilang, ada teguran. Jadi kalau kami lihat trennya lebih akan terapkan teguran dulu sebelum terapkan sanksi," ujar Argo saat dihubungi, Rabu (3/11) lalu.

Salah satu alasan kepolisian belum akan menerapkan sanksi tilang karena jumlah kendaraan yang sudah menjalani ataupun lulus uji emisi di wilayah DKI Jakarta masih sangat rendah. Kepolisian memperkirakan, sanksi tilang baru akan diterapkan jika 50 persen kendaraan di Ibu Kota sudah dinyatakan lulus uji emisi.

Selain tilang, kendaraan yang tak lulus uji emisi Ibu Kota juga akan dikenakan tarif parkir tertinggi, yaitu Rp 7.500 per jam. Penerapan tarif tertinggi sudah dilakukan di lima tempat parkir, yaitu di IRTI Monumen Nasional (Monas), Samsat Jakarta Barat, Blok M Square, Kawasan Mayesti Jakarta Selatan, dan Intercom Plaza.

Rencananya, tempat parkir yang akan menerapkan kebijakan tarif tertinggi untuk kendaraan tak lolos uji emisi bakal terus diperluas. Tarif tertinggi baru dikenakan untuk kendaraan roda empat atau motor, sedangkan untuk sepeda motor masih menggunakan tarif normal. ● yan

Ganjil Genap Berpotensi Berlaku di 25 Ruas Jalan

JAKARTA (IM) - Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan ganjil genap nomor plat kendaraan saat ini masih berlaku di 13 ruas jalan. Namun, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono mengatakan, kebijakan itu berpotensi dikembalikan penerapannya seperti sebelum masa pandemi yakni pada 25 ruas jalan sesuai Peraturan Gubernur No 88 tahun 2019.

Argo menyebut, selama PPKM level 2 sebelumnya, telah terjadi kenaikan kepadatan lalu lintas. Untuk itu, ia akan melakukan pemantauan selama sepekan ini setelah Jakarta menerapkan PPKM level 1 di mana semakin banyak pelanggaran di sektor ekonomi yang dapat berdampak pada naiknya mobilitas warga.

"Kita pantau sepekan ini sampai Senin. Kalau ada peningkatan kepadatan lalu lin-

tas naik tajam 40% sampai mendekati normal seperti sebelum pandemi, sangat mungkin ganjil genap akan kita kembalikan di 25 ruas jalan," kata Argo dalam webinar bertajuk 'Selamat Datang Bertajuk 'Tinggal Pandemi?' yang digelar oleh Masyarakat Transportasi Indonesia, Kamis (4/11).

Salah satu hal yang dapat menjadi indikator pihaknya dapat meningkatkan jumlah ruas jalan yang menjadi kawasan ganjil genap selain kepadatan lalu lintas juga adalah menurunnya tingkat kecepatan rata-rata kendaraan.

"Misalnya di tol itu maksimal kecepatan kendaraan adalah 60km/jam, tapi karena padat, kecepatan hanya 30km/jam dari awal sampai di luar tol juga. Nah, itu salah satu indikator artinya jalan sudah tak lancar dan kita perlu adakan rekayasa agar terjadi kelancaran," ungkap dia. ● yan



PENGENDARA MULAI SERBU UJI EMISI BERBAYAR

Mekanik melakukan uji emisi berbayar sebuah kendaraan bermotor roda dua di sebuah bengkel motor kawasan Veteran, Bintaro, Jakarta, Kamis (4/11). Pemilik bengkel mengaku bahwa dalam satu hari bengkelnya melayani uji emisi empat puluh kendaraan roda dua, hal ini terjadi karena akan segera diberlakukannya Perbug DKI No.66 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, untuk melakukan atau lulus uji emisi yang mulai berlaku 13 November 2021.

Kelurahan Duren Tiga Ubah Pekarangan Warga Jadi Kampung Herbal

JAKARTA (IM) - Kelurahan Duren Tiga, Pancoran Jakarta Selatan mengubah pekarangan warga di Rukun Warga (RW) 02 menjadi kampung herbal karena ditanami dengan aneka tanaman obat-obatan tradisional.

Lurah Duren Tiga, Muhammad Mursid mengatakan, penataan kampung herbal dilakukan di dua Rukun Tetangga (RT) yakni RT 01 dan RT 02 yang mendapat bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Korindo Group.

"Jadi, kampung herbal Kelurahan Duren Tiga ditujukan sebagai wadah obat-obatan tradisional. Apabila perlu tanaman obat yang agak sulit didapat, maka opsinya bisa di situ," kata Mursid saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/11).

Mursid mengatakan nantinya tanaman herbal itu akan ditanam pada pot-pot di atas lubang got atau saluran lingkungan warga setempat.

Keberadaan tanaman herbal itu, lanjutnya, merupakan buah kreativitas warga di wilayah RW tersebut yang

telah diinisiasi sejak sepuluh tahun lalu. Namun demikian, ide tersebut baru diangkat kembali pada tahun ini lewat kolaborasi dengan CSR Korindo.

"Panjang lokasinya sekitar 600 meter di dalam gang kecil warga. Ada juga di rumah warga. Tanamannya merupakan bantuan Korindo, sebagian lagi dari warga yang menyumbangkan pohon," tuturnya.

Nantinya, sejumlah tanaman herbal yang akan ditanami yakni, kelor, mahkota dewa, sambaloto, insulin, kaca beling, binahong, lidah mertua, patah tulang, pandan, sere, kunyit, lengkuas, jahe dan tanaman herbal lainnya.

Selain tanaman herbal, Mursid menambahkan ke depan sejumlah jenis buah-buahan akan ditanami juga untuk semakin menghijaukan lingkungan setempat.

"Insya Allah kita akan tambah buah-buahan, seperti melon dan anggur. Mudah-mudahan kampung ini bisa menjadi kebanggaan warga. Kita berharap keberadaannya menjadi apotek hidup," katanya. ● yan

CEGAH OKNUM PERMAINKAN HARGA

Pemprov DKI Didesak Segera Atur Batas Atas Uji Emisi Berbayar

JAKARTA (IM) - Warga pemilik kendaraan bermotor meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menetapkan batas atas atau harga tertinggi uji emisi berbayar di bengkel.

Salah satu pengendara mobil pribadi, Hendro (45), menyampaikan penatapan harga perlu dilakukan guna mencegah bengkel mematok harga tinggi saat antusiasme warga melakukan uji emisi meningkat.

"Ditetapkan nilainya. Jangan sampai ada oknum bengkel bermain dengan harga. Karena sementara ini kan tidak ada batasan harganya," katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Meski Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas uji emisi gratis, namun menurut Hendro, lokasinya masih sangat terbatas dan harus mengantre lama sehingga warga lebih memilih untuk uji emisi ke bengkel berbayar.

Kata Hendri, dirinya tak keberatan melakukan uji emisi yang dibebankan ke pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan Pemprov DKI Jakarta, asalkan harganya tak terlampaui tinggi.

"Ada masanya pemerintah menyediakan uji emisi gratis. Tapi kalau misalnya berbayar pun yang terjangkau. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 kan," jelasnya.

Penggunaan kendaraan bermotor lainnya, Hengky Franky Jeffrey (44) mengatakan lebih memilih antre lama dari pada harus ke bengkel untuk uji emisi gratis sebab harga uji emisi berbayar di bengkel terlalu mahal.

Dia pun berharap agar Pemprov DKI Jakarta menambal lokasi uji emisi gratis di masing-masing kecamatan agar mengurangi beban pengguna kendaraan warga kelas ekonomi menengah.

"Kalau yang berbayar saya cari tahu informasinya itu sekitar Rp 250 ribu, di bengkel ya. Makanya saya senang banget dengan adanya uji emisi gratis. Dibantu masyarakat kurang mampu," ucapnya.

Staf Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Gatot Jumentoro menyampaikan belum ada regulasi yang mengatur soal harga uji emisi berbayar.

Tiga Pilar dan Puskesmas Cempaka Putih Gelar Vaksinasi

JAKARTA (IM) - Tiga pilar bersama Puskesmas Cempaka Putih melaksanakan vaksinasi Covid-19, di Green Pramuka City, Jalan Jend Ahmad Yani, RT 16/RW 09, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (4/11).

Puskesmas Cempaka Putih menyiapkan kuota 100 vaksin Covid-19, dan warga yang datang dilayani 15 orang tenaga kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Rodiah.

Wadanramil 06 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kapten Czi Sefanye Banik mengatakan, vaksinasi dilakukan



sebagai langkah percepatan vaksinasi nasional guna men-

ciptakan kekebalan kelompok. Pada kegiatan vaksinasi

tersebut, aparat Tiga Pilar melakukan monitoring

atau pengawasan protokol kesehatan supaya kegiatan berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Turut serta dalam kegiatan tersebut, Babinsa Koramil 06 Cempaka Putih, Serda Sulistiono, Bhabin kamtibmas, anggota Polsek Cempaka Putih, Satpol PP Rawasari dan Satpol PP Cempaka Putih serta FKDM.

Lebih lanjut, Wadanramil mengimbau warga masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan, supaya pandemi Covid-19 segera berakhir. ● tom